

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia. Maka untuk membicarakan hukum, kita tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia.<sup>1</sup> Hukum pada umumnya yang dimaksud adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama yaitu sebagai suatu keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Fungsi hukum adalah agar tercapainya keteraturan dalam kehidupan manusia didalam masyarakat. Keteraturan inilah yang menyebabkan orang dapat hidup berkepastian, sehingga didalam melakukan kegiatan-kegiatannya dalam kehidupan sehari-hari dapat mengetahui perbuatan mana yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukannya. Manusia didalam kehidupannya mengetahui perbuatan-perbuatan mana saja yang menyimpang dimasyarakat maka kemudian akan dihindari untuk dilakukan maka terciptalah suasana kehidupan yang teratur karena perbuatan manusia lebih terarah hingga akhirnya yang menjadi muara dari tercapainya ketertiban hukum didalam kehidupan manusia. Adapun yang menjadi tujuan hukum

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, 2010, *Megenal Hukum*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 1.

adalah terpelihara dan terjaminnya keteraturan ( kepastian ) dan ketertiban.<sup>2</sup>

Alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, tujuan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Untuk mewujudkan terciptanya kedamaian dan ketertiban Pemerintah Daerah Provinsi Kota Pontianak mengesahkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum yang kemudian beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan pertama ditunjukkan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 15 tahun 2005 yang kemudian mengalami perubahan lagi untuk kedua kalinya dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 karena terdapat beberapa pasal yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat kota Pontianak saat ini. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pontianak No 3 Tahun 2004 menentukan larangan bermain layang-layang bahwa “Setiap orang dilarang bermain layang-layang didalam wilayah Daerah, kecuali pada tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan suatu Keputusan”. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Pontianak No 3 Tahun 2004 menentukan bahwa “Ditempat-tempat yang diizinkan untuk bermain layang-layang dilarang menggunakan tali dari bahan metal, logam, kawat dan sejenisnya”.

---

<sup>2</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Pertama, P.T. Alumni, Bandung, hlm. 50.

Layang-layang dianggap sebagai permainan yang dapat menyebabkan gangguan ketertiban umum bukan tanpa alasan, hal ini dibuktikan setidaknya pada awal tahun 2019 tercatat 6 warga menjadi korban dari permainan layang-layang rata-rata diakibatkan oleh layang-layang yang dimainkan dengan menggunakan tali dari bahan kawat.<sup>3</sup> Menurut data dari PLN induk wilayah Kalimantan Barat, selama tahun 2018 terdapat 426 kejadian padam listrik dan 392 kasus disebabkan penggunaan bahan kawat dalam bermain layang-layang, sekitar 94 persen gangguan listrik disebabkan oleh kawat layang-layang.<sup>4</sup> Layang-layang yang diterbangkan pada ketinggian tertentu berdasarkan keterangan yang diberikan *Safety and Risk Management* Angkasa Pura II, Bayu A Praditya mengatakan ada 2 laporan pilot dari 2 maskapai berbeda mengaku terganggu akibat aktivitas layang-layang di kawasan tepi Sungai Kapuas dan Jeruju.<sup>5</sup> Permainan layang-layang mengganggu dan dapat membahayakan nyawa para penumpang pesawat. Permainan layang-layang juga dijadikan sebagai ajang judi, meskipun tidak semua para pemain layang-layang menjadikan permainan ini sebagai judi, tetapi ada beberapa oknum yang menjadikan permainan ini sebagai ajang perjudian.<sup>6</sup>

<sup>3</sup> <http://pontianak.tribunnews.com/2019/01/26/6-warga-di-wilayah-hukum-polresta-pontianak-jadi-korban-layangan-awal-2019-ini-datanya>, diakses 07 Maret 2019.

<sup>4</sup> <https://indopos.co.id/read/2019/03/01/167222/kawat-layang-layang-ganggu-listrik-di-kalbar>, diakses 07 Maret 2019.

<sup>5</sup> <https://kumparan.com/hipontianak/layang-layang-ganggu-penerbangan-di-pontianak-1551399713775838473>, diakses 07 Maret 2019.

<sup>6</sup> <http://pontianak.tribunnews.com/2019/01/26/6-warga-di-wilayah-hukum-polresta-pontianak-jadi-korban-layangan-awal-2019-ini-datanya>, diakses 07 Maret 2019.

Penggunaan gerinda engkol untuk bermain layang-layang, ketika layangan putus tentu tali layangan akan menjuntai ke tanah. Permasalahan akan muncul ketika proses penggulungan tali tersebut. Banyak pemain layangan yang tidak ingin repot menggulung tali lalu menggunakan bantuan gerinda engkol untuk mempermudah menggulung tali. Penggunaan gerenda engkollah yang berbahaya.<sup>7</sup> Tali layangan adu umumnya menggunakan tali gelas hal ini tentu saja dapat membahayakan pengguna jalan, hal ini ditunjukkan dari kejadian yang dialami oleh Hendra yang mengalami kecelakaan lalu lintas akibat layangan putus hingga menyebabkan telinga, bibir, dan tangan patah yang terjadi pada Januari 2018 lalu.<sup>8</sup> Padahal didalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum juga dirumuskan mengenai ketentuan pidana bagi pelanggar ketertiban umum pada BAB X Ketentuan Pidana pasal 45 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pontiana Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum “Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 43 dan 44 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah )”. “Tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut adalah pelanggaran”. Disamping itu bahkan Satuan Polisi Pamong Praja sudah sering melakukan razia untuk menertibkan para pemain

<sup>7</sup> <http://pontianak.tribunnews.com/2019/01/26/6-warga-di-wilayah-hukum-polresta-pontianak-jadi-korban-layangan-awal-2019-ini-datanya>, diakses 07 Maret 2019.

<sup>8</sup> <https://www.pontianakpost.co.id/petaka-tali-kelayang>, diakses 08 Maret 2019.

layang-layang, menurut Kasatpol PP Kota Pontianak, Syarifah Adriana “merasa kecewa, maraknya pemain layang-layang karena pelaku pemain layang-layang Cuma didenda Rp. 100.000,-( seratus ribu rupiah) dan denda paling besar Rp. 1.000.000,-( satu juta rupiah ), ada warga yang sudah dikenakan tindak pidana ringan sampai di beri sanksi denda Rp. 1.000.000,-( satu juta rupiah ) tetapi tetap ramai juga yang bermain layang-layang”.<sup>9</sup> Hal ini tentu saja menjadi masalah, meskipun bermain layang-layang dilarang serta bagi yang melanggar larangan tersebut dikenakan ketentuan pidana sebagaimana yang telah dirumuskan di dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum, meski sudah ada peraturan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum agar terselenggaranya ketertiban umum tetapi Peraturan Daerah tersebut belum mampu menekan jumlah atau meminimalisir atau menanggulangi pelanggaran ketertiban umum yang dilakukan oleh pemain layang-layang yang mengganggu ketertiban umum di Kota Pontianak.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk menuangkannya dalam tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “Efektivitas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum Dalam Penanggulangan Pelanggaran Ketertiban Umum Oleh Pemain Layang-layang”.

---

<sup>9</sup> <https://kumparan.com/hipontianak/layang-layang-ganggu-penerbangan-di-pontianak-1551399713775838473>, diakses 08 Maret 2019.

**B. Rumusan masalah :**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Faktor-faktor apa yang menyebabkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum tidak efektif untuk menanggulangi pemain layang-layang yang melanggar ketertiban umum ?

**C. Tujuan penelitian :**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah :

Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tidak efektifnya Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum dalam menanggulangi pelanggaran ketertiban umum oleh pemain layang-layang.

**D. Manfaat penelitian**

1. Manfaat Teoritis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat agar membantu perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pengembangan ilmu hukum khususnya dalam kajian Hukum Pidana mengenai efektivitas Peraturan Perundang-undangan khususnya Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum.
2. Manfaat Praktis: Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan

pelanggaran ketertiban umum, yakni tingkat kesadaran hukum masyarakat Kota Pontianak mengenai pelanggaran ketertiban umum terhadap ancaman pidana yang di muat dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum yang digunakan sebagai acuan untuk mengetahui efektivitas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum dalam penanggulangan pelanggaran ketertiban umum yang dilakukan oleh pemain layang-layang di Kota Pontianak.

#### **E. Keaslian penelitian**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan karya asli penulis, bukan merupakan plagiasi maupun duplikasi hasil karya penulis lain. Apabila ada kesamaan topic yang diteliti, tentunya terdapat perbedaan dalam melakukan penelitian. Dalam hal ini ada judul skripsi yang topiknya hampir sama tapi objeknya berbeda :

1. Sri Rahayu Effendi, Nim : A 11112104, Program Kekhususan : Hukum Tata Negara, Universitas Tanjungpura Pontianak Fakultas Hukum, dengan judul skripsi “Efektivitas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum Dalam Kaitannya Pada Anak-Anak Yang Berjualan Koran Di Persimpangan Jalan Di Kota Pontianak”. Rumusan masalahnya adalah Bagaimana keberadaan anak dibawah umur yang melakukan penjualan Koran di persimpangan jalan di kota Pontianak

dilihat dari Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum ?

Hasil penelitiannya adalah sebagai berikut : a. keberadaan anak-anak berjualan Koran di persimpangan jalan di Kota Pontianak belum sesuai dengan peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum Karena Faktor kurangnya perhatian dan tanggung jawab orang tua, b. hambatan nyata ditemui dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum Dalam Kaitannya Pada Anak-Anak Yang berjualan Koran Disimpang Lampu Merah diantaranya masih adanya masyarakat Kota Pontianak yang Terbiasa membeli Koran di persimpangan jalan, c. upaya yang dilakukan pemerintah Kota Pontianak diantaranya pelanaggaran melakukan aktivitas dijalanan seperti anak berjualan Koran dan pengemis di lampu merah dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum selain itu pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Sosisal dan Tenaga Kerja setempat akan mengeluarkan larangan bagi masyarakat memberi Koran di setiap persimpangan jalan di Kota Pontianak.



Perbedaan dalam penelitian ini adalah pada objek yang diteliti yaitu pelanggaran ketertiban umum yang dilakukan oleh pemain layang-layang. Dalam hal ini saya sebagai penulis merumuskan judul “Efektivitas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum Dalam Penanggulangan Pelanggaran Ketertiban Umum Oleh Pemain Layang-Layang” yang kemudian menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut : Bagaimanakah efektivitas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum dalam penanggulangan pelanggaran ketertiban umum pemain layang-layang ?

2. Hendry Sutarman, Nim : A11110089, Program Kekhususan : Hukum Tata Negara, Universitas Tanjungpura Pontianak, dengan judul skripsi “Efektivitas Gugus Tugas Dalam Melaksanakan Perda Provinsi Kalbar Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perdagangan Orang Terutama Perempuan Dan Anak”, rumusan masalahnya adalah Mengapa Gugus Tugas Dalam Melaksanakan Perda Provinsi Kalbar Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perdagangan orang terutama Perempuan Dan Anak Belum efektif dilaksanakan ?

Hasil penelitiannya adalah sebagai berikut : a. Bahwa Gugus Tugas Dalam Melaksanakan perda Provinsi Kalbar Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perdagangan Orang Terutama Perempuan Dan Anak Di Kalbar belum begitu optimal

dilaksanakan dikarenakan masih adanya kasus kejahatan perdagangan orang khususnya wanita dan anak diwilayah Kalimantan Barat, b. Bahwa Faktor penyebab tidak efektifnya Gugus Tugas Dalam Melaksanakan Perda Provinsi Kalbar Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perdagangan Orang Terutama Perempuan Dan Anak di Kalbar, diantaranya sebagai berikut :

Pertama, faktor kurangnya koordinasi antara instansi / lembaga. Kedua, faktor kemiskinan yang masih tinggi di Kalbar. Ketiga, faktor pendidikan yang rendah. Empat, sulitnya mencari lapangan pekerjaan.

3. Ratna Juwita, Nim : A11107049, Program Kekhususan : Hukum Tata Negara, Universitas Tanjungpura Pontianak Fakultas Hukum, dengan judul skripsi “Efektivitas Pelaksanaan Pasal 18 Ayat (1) dan (2) Perda Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum Di Kota Pontianak”, rumusan masalahnya adalah Apakah ketentuan pasal 18 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum Sudah Berlaku Efektif ?

Hasil penelitiannya adalah sebagai berikut : a. bahwa larangan terhadap kegiatan penimbunan/penumpukan bahan material di sepanjang jalan umum dan tempat-tempat yang dipergunakan untuk lalu lintas umum berdasarkan pasal 18 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum telah diberlakukan dan masyarakat dianggap mengetahui akan ketentuan tersebut, namun dalam kenyataan masyarakat masih

mengabaikan atau melanggar ketentuan tersebut, b. faktor penyebab masyarakat mengabaikan/melanggar peraturan daerah tersebut adalah dikarenakan mereka tidak mempunyai tempat yang cukup/luas untuk menimbun/menumpuk bahan material, sehingga harus ditimbun di sepanjang jalan umum dan tempat-tempat yang dipergunakan untuk lalu lintas umum, c. sejauh ini upaya yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah Kota Pontianak tidak tampak jelas dalam arti tidak pernah melakukan sosialisasi pada masyarakat tentang arti pentingnya ketertiban umum yang menyangkut keamanan, kebersihan, kesehatan, keindahan, keserasian termasuk didalamnya masalah kegiatan menimbun/menumpuk bahan material disepanjang jalan umum dan tempat-tempat yang dipergunakan untuk lalu lintas umum, sehingga harus ditimbun di sepanjang jalan umum dan tempat-tempat yang dipergunakan untuk lalu lintas umum.

Perbedaan dalam penelitian ini adalah pada objek yang diteliti yaitu pelanggaran ketertiban umum yang dilakukan oleh pemain layang-layang. Dalam hal ini saya sebagai penulis merumuskan judul “Efektivitas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum Dalam Penanggulangan Pelanggaran Ketertiban Umum Oleh Pemain Layang-Layang” yang kemudian menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut : Faktor-faktor apa yang menyebabkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun

2004 tentang Ketertiban Umum tidak efektif dalam penanggulangan pelanggaran ketertiban umum pemain layang-layang ?

#### **F. Batasan konsep**

Batasan konsep yang dapat dikemukakan berdasarkan penulisan proposal sesuai dengan judul adalah :

1. Efektivitas adalah pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan.
2. Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat.
3. Ketertiban Umum dalam Pasal 1 Butir 6 Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.

#### **G. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung

data sekunder serta terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## 2. Sumber Data

Data dalam penelitian hukum empiris berupa data primer, berupa keterangan dari responden penelitian. Penelitian ini juga didukung dengan data sekunder berupa bahan hukum yang terdiri dari :

### a. Bahan hukum primer

Data Primer Menurut Soerjono Soekanto, data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian<sup>10</sup>. Data primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data yang diperoleh langsung dari responden yang berupa jawaban langsung atas pertanyaan yang diberikan berdasarkan wawancara terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti. Dalam penelitian hukum ini responden yang dimaksud adalah pemain layang-layang sebagai penduduk Kota Pontianak.

### b. Bahan hukum sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan atau bahan pustaka yang berkaitan dengan rumusan masalah. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri dari:

#### 1) Bahan hukum primer

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, & Mamudji, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm 12

- a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.
  - b) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 1976 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Ketertiban Umum.
  - c) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum.
  - d) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum.
  - e) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum.
- 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku dan internet. Disamping itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari narasumber yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Pontianak.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini, yaitu:

#### a. Studi Lapangan

##### 1) Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dari narasumber terkait efektivitas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum dalam Penanggulangan Pelanggaran Ketertiban Umum.

## 2) Kuesioner

Kuesioner dilakukan dengan memberikan pertanyaan – pertanyaan penelitian berkaitan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang diharapkan dapat memberikan jawab langsung atas permasalahan hukum yang diteliti.

### b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah cara untuk memperoleh data dengan menemukan dan mempelajari berbagai peraturan Perundang-Undangan maupun pendapat hukum yang terdapat dalam buku ataupun internet.

## 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan penetapan lokasi terjadinya permasalahan hukum yang akan diteliti. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Pontianak.

## 5. Populasi dan Sampel

a. Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama (homogenitas), dapat berupa himpunan orang, benda atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah penduduk Kota Pontianak.

- b. Sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil untuk dilakukan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah *purposive sampling* yaitu peneliti menggunakan pertimbangannya sendiri dengan berbekal pengetahuan yang cukup tentang populasi untuk memilih anggota – anggota sampel.<sup>11</sup> Pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara dipilih atau ditunjuk berdasarkan pertimbangan bahwa responden dan narasumber mempunyai hubungan yang erat dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini. Penulis menggunakan sampel dari beberapa pemain layang-layang sebagai penduduk Kota Pontianak.

#### 6. Responden dan Narasumber

- a. Responden adalah subyek yang telah ditentukan berdasarkan penentuan sampel. Responden akan memberikan jawaban atas pertanyaan – pertanyaan penelitian yang diberikan melalui kuesioner dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian kepada pemain layang-layang.
- b. Narasumber adalah subyek yang berkedudukan sebagai ahli, profesional, maupun sebagai pejabat yang dapat memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah hukum yang diteliti. Narasumber dalam penelitian hukum ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

#### 7. Analisis Data

---

<sup>11</sup> Maria SW Sumardjono, 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, hlm. 23.



Data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan, kemudian dianalisis dengan metode kualitatif. Artinya, data yang berhasil dikumpulkan dari penelitian, dipilih berdasarkan mutu dan kualitasnya serta mempunyai kaitan dengan permasalahan yang dibahas. Metode berfikir yang diterapkan berupa metode induktif, yaitu pengumpulan dari pengetahuan yang bersifat khusus kemudian disimpulkan menjadi pengetahuan yang bersifat umum.

#### **H. Sistematika Skripsi**

Sistematika skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum atau skripsi yang terdiri dari 3 bab:

##### **Bab I: PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

##### **Bab II: PEMBAHASAN**

Bab ini terdiri atas Tinjauan Pustaka yang terdiri pada bagian A yang berisi tinjauan tentang upaya penanggulangan tindak pidana dan pada bagian B berisi tinjauan tentang pelanggaran ketertiban umum, selanjutnya pada bagian C berisi faktor-faktor penyebab tidak efektifnya Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum dalam menanggulangi pelanggaran ketertiban umum oleh pemain layang-layang.

##### **Bab III: PENUTUP**

Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban dari rumusan masalah dan saran dari penulis berkaitan dengan hasil temuan yang didapatkan.

